

BAB I

PENDAHULUAN

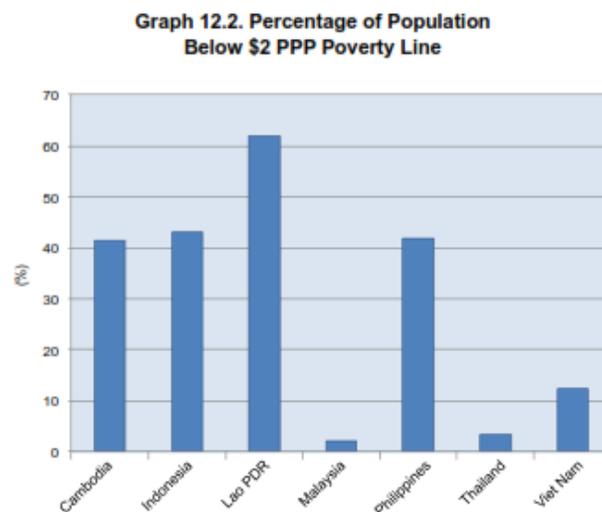
A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan fenomenal dalam bidang ekonomi yang tidak luput dari perhatian pemerintah di setiap negara dan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalani pelayanan publik terhadap masyarakat. Kemiskinan menjadi perhatian yang begitu besar oleh seluruh negara, khususnya pada negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berada di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) menyadari, bahwa permasalahan kemiskinan ini dapat menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemiskinan pada umumnya dapat dikatakan sebagai keadaan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer pada seseorang.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi, meliputi berbagai macam persoalan sosial dan ekonomi seperti kriminalitas, pengemis, anak terlantar, tuna susila, dan sebagainya. Tentu sudah pasti, permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia akan membahas mengenai pembangunan nasional sebagai tujuan utama. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari keberhasilan sebuah negara untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil serta dapat mengurangi kemiskinan suatu negara (Tri Widodo, 2015). Karena salah satu tujuan pada pembangunan nasional adalah

sesuai yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mandiri. Dengan kata lain, seseorang yang sudah sejahtera, maka sudah dapat meredam kemiskinan yang membelenggu dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya.

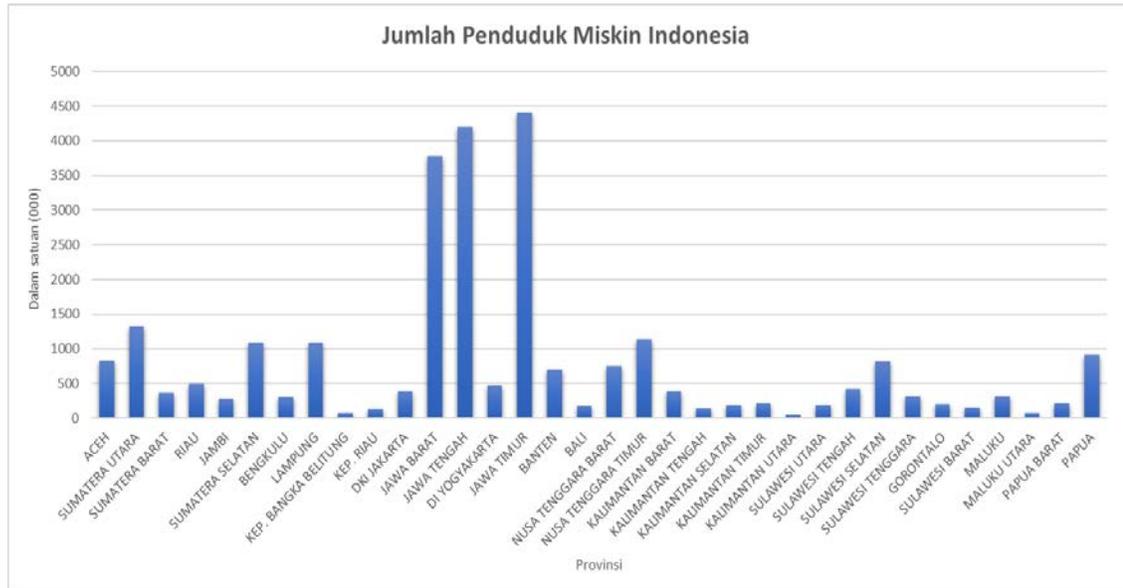
Sementara itu, 75 juta orang yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik hidup dengan pendapatan di bawah dari US\$3.10 perhari. Tercatat tiga negara yang mencakup sebagian besar penduduk miskin di kawasan ini yaitu Cina, Filipina dan Indonesia (Baker, 2017). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh *Lead Urban Specialist World Bank* ini menggambarkan, bahwa negara Indonesia adalah salah satu penyumbang angka kemiskinan terbesar di dunia.



Gambar I.1 Percentage Poverty Line

Sumber : ASEAN Statistical Years Book 2017

Pada gambar I.2 terlihat adanya 7 negara ASEAN yang memiliki populasi kemiskinan dengan kondisi penduduk yang memiliki pendapatan per harinya masih di bawah \$2. Laos adalah negara tertinggi yang memiliki populasi penduduk dengan pendapatan perharinya di bawah \$2, yaitu sebanyak 62%. Setelah itu, ada Indonesia sebesar 43%, Filipina 42%, Kamboja 41%, Vietnam 12%, Thailand 4%, dan Malaysia 2%. Dapat diketahui, Indonesia mendapati posisi kedua dalam jumlah populasi penduduk yang memiliki pendapatan perharinya di bawah \$2.



Gambar I.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Sumber : BPS tahun 2017 (data sekunder diolah oleh peneliti)

Gambar I.2 adalah menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia berdasarkan menurut Provinsi pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin yang terbanyak dalam data yang dipaparkan tersebut adalah 3 Provinsi yang berada di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur sebanyak 4.405.270 jiwa, Jawa Tengah sebanyak 4.197.490 jiwa, dan Jawa Barat sebanyak 3.774.410 jiwa. Sedangkan Provinsi yang

memiliki jumlah penduduk miskin terendah adalah Kalimantan Utara sebanyak 48.560 jiwa, Kep. Bangka Belitung sebanyak 76.200 jiwa, dan Maluku Utara sebanyak 78.280 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia antar provinsi pada tahun 2017 ini mengalami naik turun setiap semesternya dan menjadi sebuah masalah yang begitu serius untuk ditangani agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kemiskinan yang berlebih untuk kedepannya. Ketimpangan yang begitu berlebih jika diperhatikan kembali gambar I.3, justru Pulau Jawa yang menjadi tempat pusat pemerintahan dan pusat perekonomian menjadi penyumbang angka kemiskinan yang begitu besar. Hal ini terjadi karena belum meratanya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia sehingga belum cukup untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara berkelanjutan dan masih adanya terjadi ketimpangan antar daerah yang begitu signifikan.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, telah membuat catatan besar di kawasan *ASEAN* pada data yang disajikan oleh *ASEAN Statistical Years Book*. Tidak hanya itu, bahkan menjadi catatan bagi negara Indonesia sendiri yang masih belum mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali mengenai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan saat ini apakah masih relevan untuk digunakan atau harus ada kebijakan baru untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi dan mampu merealisasikan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dibutuhkan usaha dan

keterlibatan pemerintah Indonesia sebagai pengelola negara yang menjadi sebuah sorotan besar mengingat angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah Indonesia sudah memberikan kewenangan tiap daerah dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan keluasaan pada tiap daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini memberikan warna baru pada perekonomian daerah untuk memaksimalkan kebutuhan pendapatan daerahnya agar mampu memiliki kapasitas fiskal yang besar, karena sebelumnya banyak daerah yang mengalami kekurangan dalam hal kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan sosial ekonomi di masing – masing daerah.

Untuk memaksimalkan kebutuhan fiskal tiap daerah, pemerintah daerah telah memiliki keluasaan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi sebuah nuansa baru dan sekaligus menjadi tantangan untuk pemerintah daerah agar dapat mandiri dalam menggali potensi daerah dan mampu meningkatkan penerimaan daerah serta memaksimalkan kebutuhan fiskal daerah masing – masing untuk dapat melaksanakan program – program pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan publik untuk kesejahteraan pada masyarakatnya.

Tabel 1.1 Indeks Kapasitas Fiskal Indonesia

Sumber : DJPK tahun 2015-2017 (data sekunder diolah oleh peneliti)

No.	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		
		2015	2016	2017
1	Provinsi Aceh	1,15	1,70	1,02
2	Provinsi Sumatera Utara	0,37	0,31	0,79
3	Provinsi Sumatera Barat	0,49	0,55	0,53
4	Provinsi Riau	0,99	0,98	1,06
5	Provinsi Jambi	0,65	0,62	0,46
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,34	0,39	1,16
7	Provinsi Bengkulu	0,37	0,31	0,31
8	Provinsi Lampung	0,24	0,23	0,56
9	Provinsi DKI Jakarta	8,69	6,36	7,87
10	Provinsi Jawa Barat	0,27	0,30	2,86
11	Provinsi Jawa Tengah	0,12	0,18	1,06
12	Provinsi DI Yogyakarta	0,26	0,40	0,51
13	Provinsi Jawa Timur	0,20	0,24	3,14
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,42	0,56	0,48
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,35	1,17	0,61
16	Provinsi Kalimantan Selatan	1,50	1,25	0,70
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,66	3,44	1,63
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,66	0,63	0,37
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,34	0,34	0,36
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,32	0,35	0,68
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,35	0,38	0,35
22	Provinsi Bali	1,49	1,27	0,74
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,15	0,18	0,45
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,12	0,16	0,39
25	Provinsi Maluku	0,30	0,34	0,29
26	Provinsi Papua	0,95	1,61	2,00
27	Provinsi Maluku Utara	1,15	1,01	0,30
28	Provinsi Banten	0,58	0,60	1,00
29	Provinsi Bangka Belitung	1,27	1,40	0,25
30	Provinsi Gorontalo	0,33	0,34	0,23
31	Provinsi Kepulauan Riau	1,68	1,47	0,44
32	Provinsi Papua Barat	2,45	2,99	0,83
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,47	0,49	0,25
34	Provinsi Kalimantan Utara	3,66	1,45	0,33

Jika dilihat data Indeks Kapasitas Fiskal dari tahun 2015 – 2017, seluruh provinsi mengalami fluktuatif dalam waktu tiga tahun terakhir indeks kapasitas fiskalnya. Bahkan, ada provinsi yang mengalami penurunan yang begitu drastis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Ini menandakan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh setiap provinsi mengalami ketidakstabilan dalam penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, terdapat sepuluh provinsi yang mengalami penurunan kapasitas fiskal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Seluruh provinsi harus mampu menaikkan kapasitas fiskal tiap daerah, karena semakin besar kapasitas fiskal yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa, peran pemerintah mengalami peningkatan dalam melakukan pembangunan. Menurut Dumairy (1996), pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan – kegiatannya. Pengeluaran – pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari – hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang

kegiatan ekonomi secara umum. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah harus mampu menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat.

Permasalahan kemiskinan sangat menuntut adanya peran pemerintah yang lebih dalam penanggulangannya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 adalah amanat yang harus diemban oleh pemerintah, bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini sudah menjadi konsekuensi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang harus mendapatkan kesejahteraan yang berarti salah satunya adalah terlepas dari belenggu kemiskinan yang menghimpit dan menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kemiskinan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2016), Franciari dan Sugiyanto (2013) mengemukakan adanya pengaruh antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pou, Sulastrri dan Setyarini (2015) mengemukakan hal lain, yaitu tidak adanya pengaruh antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat dan Sriyono (2016), Sunusi, Kumenaung dan Rotinsulu (2014), Amalia, Madris dan Razak (2015) mengemukakan

bahwa adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pateda, Masinambouw, dan Rotinsulu (2016) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.

Sebagaimana uraian dari penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Untuk itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bukti empiris yang baru terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Selain itu, peneliti merasa bahwa penelitian tentang kapasitas fiskal masih sedikit, khususnya pada yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2015-2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka pada penelitian ini, dapat penulis identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu:

1. Pendapatan daerah yang rendah membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membiayai program – program yang direncanakan untuk melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kemiskinan yang terjadi akibat dari berbagai persoalan dan bersifat multidimensi yang membutuhkan campur tangan pemerintah yang responsif sebagai wujud tanggungjawab dari konstitusi;
3. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu selama periode penelitian;
4. Masih terbatasnya penelitian terkait pengaruh kapasitas fiskal terhadap kemiskinan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan, kemiskinan adalah permasalahan yang begitu luas dan kompleks. Berhubung keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Periode pengamatan selama 3 tahun, yaitu tahun 2015-2017;
2. Variabel independen yang diuji yaitu kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel dependen adalah kemiskinan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat peneliti rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kapasitas fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 – 2017?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 – 2017?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 – 2017?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan baru mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan khususnya pada peran pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar kajian yang lebih mendalam untuk dikembangkan, menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

b. Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini nantinya akan dapat dijadikan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya untuk dikembangkan lagi mengenai tentang pengaruh kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia.

c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai dasar menyusun rencana dalam pembuatan kebijakan strategis peran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah informasi dan wawasan masyarakat mengenai kemiskinan di Indonesia.